

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. “Berdasarkan data dari Worldmeters, sampai tahun 2019 Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa” (Jayani, 2019) dalam Wulandari (2020). Dan pada tahun 2021 ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 271 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya, “pemerintah yang berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi penduduk Indonesia dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif” (Agustina, 2016). Sebagai bentuk nyata peran pemerintah dalam menghadapi resiko yang terjadi dalam bidang kesehatan, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian pada Tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga dikenal sebagai BPJS Kesehatan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), disebutkan bahwa ruang lingkup BPJS terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, program yang terdapat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi : program Jaminan Hari Tua (JHT), program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) program Jaminan Kematian (JKM) dan program Jaminan Penisun (JP). Manfaat jaminan kesehatan mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis, selain itu juga manfaat dari BPJS ini membantu masyarakat yang tidak mampu dalam segi ekonomi dalam pengobatan atas penyakit yang dideritanya, memudahkan

masyarakat dalam penggunaan kartu BPJS yang berlaku secara nasional, sehingga masyarakat dengan mudah menggunakan BPJS ini di wilayah Indonesia, begitu juga sebaliknya jika tidak mempunyai kartu BPJS ini akan mempersulit diri sendiri, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu, jika tidak mempunyai kartu BPJS ini mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit yang memadai pada rumah sakit yang telah berkerja sama dengan BPJS.

Oleh karena besarnya manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan Program BPJS Kesehatan ini, pemerintah membuat Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan yang bertujuan supaya semua warga negara Indonesia ikut dalam kepesertaannya sehingga kepesertaan ini bersifat wajib. Atas dasar kewajiban kepesertaan ini diharapkan seluruh warga negara Indonesia memiliki pengetahuan tentang BPJS Kesehatan, “karena semakin tinggi pengetahuan akan berpengaruh pada kepesertaan BPJS Kesehatan” Anjani & NurulAulia (2017). Sasaran program BPJS Kesehatan ini adalah kepala keluarga, karena kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK). Oleh karena itu, bagi kepala keluarga yang telah mengetahui dan mengerti tentang program BPJS kesehatan dapat mendaftarkan keanggotaannya. “Namun disisi lain banyak dari kepala keluarga yang telah mengetahui tentang BPJS akan tetapi tidak mendaftar dan ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan” (Wawan, Dewi. 2010) dalam (Anjani & NurulAulia, 2017).

Jumlah penduduk desa Batangsaren sampai bulan Juni 2021 sebanyak 7.668 jiwa. Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terkait BPJS Kesehatan di Desa Batangsaren sebanyak 2.012 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas administrasi di Kantor Kepala Desa Batangsaren di Desa Batangsaren dan 5 kepala keluarga di Desa Batangsaren masih belum terlalu banyak warga Desa Batangsaren yang paham mengenai informasi terkait BPJS Kesehatan secara mendalam. Pemahaman kebanyakan dari warga desa tentang BPJS Kesehatan hanya terdiri dari satu jenis yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang di beri dari desa untuk warga yang kurang mampu. Pengetahuan kepala keluarga tentang program dan manfaat BPJS Kesehatan juga masih kurang sehingga masih belum terlalu banyak yang ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan mengkaji tingkat pengetahuan kepala keluarga terhadap program BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Pengetahuan Kepala Keluarga Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan kepala keluarga tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Desa Batangsaren?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengetahuan kepala keluarga tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Desa Batangsaren.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang pengertian, manfaat, kepesertaan, dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Desa Batangsaren.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Desa Batangsaren

Sebagai masukan bagi kepala desa Batangsaren dalam upaya penyuluhan terhadap pengetahuan tentang BPJS Kesehatan.

1.4.2 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai penerapan teori yang telah didapat dari matakuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

1.4.3 Bagi Instrumen Pendidikan

Dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian di atas.